

ANALISIS PERAN KEBIJAKAN FISIKAL DAN MONETER DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI MAKRO

Jeliana Situmorang¹, Leo Fernando Simatupang², Apriana Manalu³, Marianti Ulandari⁴, Daniel Simanjuntak⁵, Cindy Pardosi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Email : jelianasitumorang5@gmail.com¹, leo.uhkbp@gmail.com²,
aprianamanalu2@gmail.com³, mariantiulandari234@gmail.com⁴,
danielsmjtk06@gmail.com⁵

ABSTRACT

Macroeconomic stability is the primary foundation for maintaining a nation's prosperity, as reflected in controlled inflation, low unemployment, sustainable economic growth, and price stability. The government, along with monetary authorities, plays a strategic role in maintaining these conditions through the implementation of fiscal and monetary policies. Fiscal policy relates to the management of state revenues and expenditures, while monetary policy, implemented by Bank Indonesia, focuses on controlling the money supply and interest rates. Synergy between these two policies is crucial, as expansionary fiscal policy without appropriate monetary policy has the potential to trigger inflation, while excessively restrictive monetary policy during an economic slowdown can exacerbate economic contraction. This study uses a qualitative approach to analyze the effectiveness of fiscal and monetary policies in maintaining economic stability. It also addresses gaps in previous research and provides theoretical and practical contributions to policymakers in formulating sustainable economic development strategies. The results indicate that coordination between fiscal and monetary policies plays a significant role, particularly during the COVID-19 pandemic, through the provision of fiscal stimulus and interest rate cuts to stabilize the economy. When economic conditions weaken, the government implements an expansionary fiscal policy supported by accommodative monetary policy, such as setting low interest rates, to encourage consumption and investment. Conversely, when inflation rises, implementing a tight fiscal policy coupled with a contractionary monetary policy can suppress aggregate demand and maintain price stability. Striking a balance between these two policies is key to achieving sustainable macroeconomic goals: stable economic growth, controlled inflation, and low unemployment.

Keywords: Macroeconomic Stability, Fiscal Policy, Monetary Policy, Inflation, Economic Growth, Policy Coordination.

ABSTRAK

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi utama dalam menjaga kesejahteraan suatu negara, yang tercermin dari tingkat inflasi yang terkendali, rendahnya pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, serta kestabilan harga. Pemerintah bersama otoritas moneter memiliki peran strategis dalam menjaga kondisi tersebut melalui penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan belanja negara, sedangkan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Sinergi antara kedua kebijakan ini menjadi sangat penting, karena kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif tanpa diiringi kebijakan moneter yang tepat berpotensi memicu inflasi, sementara kebijakan moneter yang terlalu ketat pada saat perekonomian mengalami perlambatan dapat memperparah kontraksi ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang signifikan, terutama pada masa pandemi COVID-19, melalui pemberian stimulus fiskal dan penurunan suku bunga guna menstabilkan perekonomian. Ketika kondisi ekonomi melemah, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan dukungan kebijakan moneter yang akomodatif, seperti penetapan suku bunga rendah untuk mendorong konsumsi dan investasi. Sebaliknya, pada saat inflasi meningkat, penerapan kebijakan fiskal yang ketat disertai kebijakan moneter kontraktif dapat menekan permintaan agregat dan menjaga stabilitas harga. Keseimbangan antara kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam mencapai tujuan ekonomi makro yang berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta tingkat pengangguran yang rendah.

Kata Kunci: Stabilitas Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Koordinasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu fondasi utama dalam menunjang kesejahteraan ekonomi suatu negara. Kondisi ini tercermin melalui berbagai indikator ideal, seperti inflasi yang terjaga, tingkat pengangguran yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang

berkesinambungan, stabilitas harga, serta keseimbangan neraca pembayaran (Davoodi et al., 2021; Novalina, 2019). Di tengah dinamika globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, pemerintah dan bank sentral di berbagai negara terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro melalui penerapan kebijakan fiskal dan moneter

yang efektif. Kedua instrumen kebijakan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara, khususnya yang berkaitan dengan pajak dan belanja pemerintah (Sukirno, 2012). Di Indonesia, kebijakan fiskal diterapkan sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas perekonomian. Pada saat perekonomian mengalami perlambatan atau resesi, pemerintah cenderung menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif melalui peningkatan belanja negara atau penurunan pajak guna mendorong permintaan agregat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika perekonomian menunjukkan gejala overheating atau tekanan inflasi yang tinggi, kebijakan fiskal kontraktif, seperti pengurangan belanja negara atau peningkatan pajak, diterapkan untuk menekan laju inflasi dan menjaga keseimbangan fiskal (Mutiara et al., 2024).

Di sisi lain, kebijakan moneter merupakan serangkaian langkah yang ditempuh oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan jumlah uang beredar, menjaga stabilitas nilai tukar, menekan tingkat pengangguran, menstabilkan harga barang dan jasa, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif (Gita et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif diarahkan untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan suku bunga, sedangkan kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menaikkan tingkat suku bunga (Raysharie & Alviandi, 2024).

Sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Kedua kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan secara terpisah, mengingat kebijakan yang diterapkan pada satu sektor akan berdampak pada sektor lainnya (Okri Handoko et al., 2023). Sebagai contoh, kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif tanpa dukungan kebijakan moneter yang sesuai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi. Sebaliknya, kebijakan moneter yang terlalu ketat pada saat kondisi ekonomi sedang melemah dapat memperdalam kontraksi ekonomi. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara pemerintah dan bank sentral menjadi

kunci agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling melengkapi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro (Aristina et al., 2020).

Di Indonesia, peran kebijakan fiskal dan moneter terbukti sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada masa krisis global akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai stimulus fiskal untuk mendukung sektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial. Pada saat yang sama, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan serta melakukan intervensi di pasar keuangan guna menjaga stabilitas nilai tukar dan memastikan kecukupan likuiditas perbankan. Kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter tersebut dinilai berhasil meredam dampak krisis dan mencegah terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam (Sari et al., 2024).

Meskipun demikian, penerapan kebijakan fiskal dan moneter juga mengandung sejumlah risiko. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dalam jangka panjang dapat meningkatkan defisit anggaran dan menimbulkan beban fiskal bagi negara. Sementara itu, kebijakan moneter yang terlalu longgar berpotensi memicu inflasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter perlu menerapkan kebijakan secara hati-

hati dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global maupun domestik. Selain itu, perlu disadari bahwa dampak kebijakan fiskal dan moneter tidak bersifat instan, melainkan membutuhkan waktu untuk mempengaruhi perekonomian. Dengan demikian, evaluasi yang berkelanjutan serta penyesuaian kebijakan secara tepat waktu menjadi sangat penting agar efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro tetap terjaga.

Dengan demikian, peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi makro memiliki arti yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Di tengah dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, kemampuan pemerintah dan otoritas moneter dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan yang tepat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Melalui koordinasi yang efektif, kedua kebijakan tersebut dapat saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas ekonomi makro. Mutiara et al. (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa

kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang prudent agar stabilitas harga dan defisit anggaran tetap terjaga. Selanjutnya, penelitian Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah dan pemberian insentif fiskal terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meredam dampak negatif dari berbagai tekanan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Okri Handoko et al. (2023) mengungkapkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat berkontribusi dalam mencapai stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Temuan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Raysharie dan Alviandi (2024) menyatakan bahwa sinergi antara

kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Variabel pajak, jumlah uang beredar, dan suku bunga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat sejumlah celah penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis salah satu instrumen kebijakan, sehingga kajian yang mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter secara simultan masih relatif terbatas. Kedua, penelitian terdahulu umumnya menggunakan data runtut waktu (time series), sementara pemanfaatan data panel untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di berbagai daerah di Indonesia masih minim. Penggunaan data panel berpotensi memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi regional dalam efektivitas kebijakan fiskal serta memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan di tingkat daerah. Ketiga, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada dampak jangka pendek, sedangkan kajian mengenai pengaruh kebijakan fiskal dan

moneter dalam jangka panjang masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi makro yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas harga, serta keseimbangan neraca pembayaran. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang telah diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi, menurunkan tingkat pengangguran, menjaga stabilitas harga, mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peran kebijakan fiskal dan moneter dalam dinamika ekonomi makro. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang

stabil dan inklusif di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Beberapa penelitian terbaru menegaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan moderasi fluktuasi ekonomi. Zulaikah (2024) menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif yang didukung oleh kebijakan moneter akomodatif terbukti signifikan dalam menstabilkan perekonomian terutama saat kondisi ekonomi melemah, sedangkan kombinasi kebijakan kontraktif dapat menekan tekanan inflasi saat harga meningkat. Sinergi ini menjadi kunci pencapaian tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi.

Riset lain oleh Gulo dan Efendi (2024) yang menggunakan data time series menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter saling berpengaruh terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia. Variabel seperti pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar dan suku bunga memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar.

Penelitian oleh Mutiara et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia sepanjang dekade terakhir efektif

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan pengangguran, tetapi perlu pengelolaan fiskal yang prudent untuk menjaga kendali inflasi dan defisit anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa peran kebijakan fiskal tidak hanya dalam stimulus ekonomi, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan makro jangka menengah hingga panjang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji secara mendalam serta menganalisis peran kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas ekonomi makro. Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, yang meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, laporan resmi pemerintah, publikasi lembaga internasional, serta artikel berita dan opini yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan yang sistematis, mulai dari penelusuran dan identifikasi sumber literatur, dilanjutkan dengan proses pembacaan, pemahaman, pencatatan, hingga analisis terhadap informasi yang relevan dari sumber-sumber yang telah dipilih. Selanjutnya, analisis

data dilakukan menggunakan teknik analisis konten (content analysis), yaitu dengan menelaah kembali berbagai literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama serta kategori-kategori penting yang muncul.

Melalui pendekatan dan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, sekaligus memberikan kontribusi yang bermakna bagi perumusan kebijakan ekonomi di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Indikator Makroekonomi

Indonesia 2010-2025

Tahun	PDB Rill (Persen)	Inflasi (Persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Defisit Anggaran Negara (PDB %)	Suku Bunga PBI (Persen)
2010	4,97	7,26	7,68	-2,21	5,61
2011	5,02	3,31	7,50	-2,07	5,71
2012	5,09	4,12	7,07	-1,76	5,88
2013	5,59	4,50	6,82	-1,73	6,03
2014	5,18	3,61	5,98	-1,89	7,50
2015	4,79	2,34	6,10	-2,38	7,59
2016	5,02	3,13	5,33	-2,09	5,19
2017	5,31	3,65	5,31	-2,03	4,50
2018	5,27	3,18	5,13	-2,08	5,50
2019	5,02	2,96	5,23	-2,07	6,10
2020	-2,09	1,62	6,27	-6,06	3,25
2021	3,69	1,96	6,36	-4,35	3,50
2022	5,39	2,38	5,33	-3,02	3,59
2023	5,13	3,21	5,28	-2,85	4,23
2024	5,02	1,57	4,7	-2,29	4,75
2025	5,12	2,92	4,9	-2,82	4,75

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan indikator makroekonomi yang telah dipaparkan,

dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia selama periode pengamatan menunjukkan kecenderungan yang positif meskipun mengalami fluktuasi. Pada beberapa periode, seperti tahun 2010–2013, 2017–2018, serta 2022, laju pertumbuhan PDB berada di atas 5 persen. Kondisi ini didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, serta peran ekspor yang cukup signifikan. Sebaliknya, pada periode 2014–2016 dan terutama tahun 2020, perekonomian mengalami perlambatan bahkan kontraksi, dengan tahun 2020 dipengaruhi secara kuat oleh dampak pandemi COVID-19.

Sementara itu, tingkat inflasi secara umum menunjukkan tren penurunan sepanjang periode tersebut, meskipun terdapat pengecualian pada tahun 2010 dan 2014 ketika inflasi relatif tinggi akibat kenaikan harga pangan. Dalam hal ini, kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas inflasi agar tetap berada di bawah 5 persen. Namun, pada tahun 2020 sempat terjadi lonjakan inflasi yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka secara umum memperlihatkan kecenderungan menurun, meskipun mencapai titik tertinggi pada tahun 2010 dan 2020. Pertumbuhan ekonomi yang kuat serta kebijakan ketenagakerjaan berkontribusi dalam

menekan tingkat pengangguran, walaupun tantangan peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih tetap menjadi perhatian.

Selanjutnya, perkembangan defisit anggaran negara selama periode 2010–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi cukup tajam, dengan tingkat defisit tertinggi terjadi pada tahun 2020 akibat penurunan penerimaan negara serta peningkatan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi. Dalam merespons kondisi tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pengendalian defisit melalui kebijakan konsolidasi fiskal dan optimalisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI/BI-7DRR) cenderung mengalami penurunan secara bertahap meskipun disertai fluktuasi, yang mencerminkan arah kebijakan moneter yang lebih akomodatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia sepanjang periode 2010–2025 menunjukkan tingkat ketahanan yang relatif kuat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global dan dampak pandemi. Kebijakan yang adaptif serta dukungan dari sektor-sektor utama, khususnya konsumsi, investasi, dan ekspor, menjadi faktor

penting dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 2. Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia 2010-2025

Tahun	Pendapatan Negara	Belanja negara	Saldo Anggaran	Kebijakan	Catatan
2010	1.302,7	1.525,4	-222,7	<u>Eksansif</u>	
2011	1.435,2	1.642,6	-207,4	<u>Eksansif</u>	
2012	1.571,3	1.768,8	-197,5	<u>Eksansif</u>	
2013	1.714,4	1.913,6	-199,2	<u>Eksansif</u>	
2014	1.823,1	2.027,9	-204,8	<u>Eksansif</u>	
2015	1.771,6	2.026,1	-254,5	<u>Kontraktif</u>	Penerapan kebijakan fiskal kontraktif ini dilakukan untuk menekan laju inflasi yang tinggi pada tahun 2015.
2016	1.822,9	2.031,6	-208,7	<u>Kontraktif</u>	Kebijakan fiskal kontraktif dilanjutkan di tahun 2016 untuk menjaga stabilitas ekonomi makro
2017	1.910,7	2.171,8	-261,1	<u>Kontraktif</u>	Kebijakan fiskal kontraktif masih diterapkan di tahun 2017 meskipun dengan fokus yang lebih pada efisiensi belanja negara
2018	1.977,8	2.200,7	-222,9	<u>Kontraktif</u>	Kebijakan fiskal kontraktif di tahun 2018 dilakukan dengan fokus pada pengurangan dan defisit anggaran negara.
2019	2.002,2	2.313,5	-311,3	<u>Kontraktif</u>	Kebijakan fiskal kontraktif masih diterapkan di tahun 2019 untuk menjaga stabilitas Ekonomi
2020	1.722,3	2.616,0	-893,7	<u>Eksansif</u>	Kebijakan fiskal ekspansif diterapkan di tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi COVID-19.
2021	1.405,8	2.771,5	-1.365,7	<u>Eksansif</u>	Kebijakan fiskal ekspansif dilanjutkan di tahun 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.
2022	1.917,7	2.750,7	-833,0	<u>Eksansif</u>	Kebijakan fiskal ekspansif masih diterapkan di tahun 2022 meskipun dengan fokus yang lebih pada konsolidasi Fiskal
2023	1.806,9	2.914,5	-1.107,6	<u>Eksansif</u>	Kebijakan fiskal ekspansif di tahun 2023 dilakukan dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
2024	2.802,3	3.335,5	-1.100,6	<u>Eksansif</u>	Kebijakan fiskal ekspansif di tahun 2024 dilakukan dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan penciptaan

lapangan kerja dan deficit APBN di tahun 2024

2025	3.215,2	4.717,5	-457,93	<u>Eksansif</u>	Kebijakan fiskal ekspansif di tahun 2024 dilakukan dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta realisasi melebar PDB 2,92 %
------	---------	---------	---------	-----------------	---

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 3. Kebijakan Moneter tahun 2010-2025

Tahun	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah/US D (Rata-rata)	BI Rate / 7-Day RR Rate (%)	Jumlah Uang Beredar (M2) dalam Triliun IDR
2010	7,26	9.088,00	5,61	2.243,3
2011	3,31	8.770,00	5,71	2.649,7
2012	4,12	9.670,00	5,88	3.091,5
2013	4,50	10.460,00	6,03	3.474,3
2014	3,61	11.878,00	7,50	3.920,1
2015	2,34	13.795,00	7,59	4.246,5
2016	3,13	13.436,00	5,19	4.743,7
2017	3,65	13.548,00	4,50	5.226,4
2018	3,18	14.481,00	5,50	5.588,3
2019	2,96	13.901,00	6,10	6.052,9
2020	1,62	14.105,00	3,25	6.889,5
2021	1,96	14.308,00	3,50	7.203,8
2022	2,38	14.875,00	5,59	7.967,1
2023	3,21	15.520,00	4,23	8.824,7
2024	1,57	15.841,00	6,00	9.210,8
2025	2,92	16.500,00	5,50	9.650,8

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan table 3. di atas dapat kita lihat bahwa, Inflasi di Indonesia berfluktuasi dengan tingkat tertinggi di tahun 2010 (7,26%) dan menurun tajam di tahun-tahun berikutnya. Inflasi yang relatif terkendali sejak 2011 didorong oleh kebijakan moneter yang ketat dan pengendalian harga pangan. Namun, pada tahun 2023 inflasi cenderung meningkat sebesar (3,21%) yang mungkin dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Berikutnya Nilai tukar rupiah terhadap

dolar AS memperlihatkan tren depresiasi atau pelemahan dari 9.088 rupiah per USD di tahun 2010 menjadi 15.520 rupiah di tahun 2023. Depresiasi ini terutama dipicu oleh ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan arus modal keluar dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Suku bunga acuan Bank Indonesia, baik melalui BI Rate maupun 7-Day Reverse Repo Rate (7-Day RR Rate), adalah instrumen utama untuk mengendalikan inflasi dan mendorong stabilitas nilai tukar. Pada awalnya, BI Rate berada di sekitar 5-6% di awal dekade, namun dinaikkan menjadi 7,50% di tahun 2014 seiring tekanan inflasi dan pelemahan rupiah. Suku bunga kemudian diturunkan kembali, terutama pada tahun 2020 hingga mencapai 3,25% untuk merangsang ekonomi di tengah pandemi COVID-

199. Adapun Jumlah uang beredar atau M2, meningkat signifikan dari tahun ke tahun, mulai dari Rp2.243,3 triliun pada 2010 hingga Rp8.824,7 triliun pada 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter akomodatif dari Bank Indonesia, perkembangan sektor kredit, serta kebutuhan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 2024 tingkat inflasi mengalami penurunan sebesar 1,57% dan Rata-rata Tukar Nilai

Rupiah/USD 6,00. Ada pun jumlah uang beredar atau M2 meningkat secara signifikan sebesar Rp.9.210 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kebijakan moneter dan kebijakan Fiskal. Pada tahun 2025 mengalami fluktuasi dimana inflasi naik menjadi 2,92 % dan nilai tukar rupiah menjadi 16.500 sedangkan jumlah uang beredar M2 sekitar 9.650 triliun. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah kebijakan moneter akomodatif yaitu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lebih banyak likuiditas (uang) dalam sistem keuangan. Kebijakan ini biasanya diterapkan melalui penurunan suku bunga acuan, pelonggaran syarat kredit, atau pembelian aset seperti obligasi oleh bank sentral.

Table 4. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Makroekonomi Indonesia

Tahun	Indikator	Dampak Kebijakan Fiskal
	Makroekonomi	
2010	PDB riil	Pertumbuhan PDB riil sebesar 4,97% didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif pemerintah.
2011	Inflasi	Inflasi turun menjadi 3,31% setelah pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang lebih prudent.

2012	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,07% seiring dengan meningkatnya belanja pemerintah untuk infrastruktur dan program sosial.
2013	Defisit Anggaran Negara	Defisit anggaran negara turun menjadi -1,73% PDB setelah pemerintah melakukan penghematan anggaran.
2014	Suku Bunga SPBI	Suku bunga SPBI naik menjadi 7,50% akibat kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk menekan inflasi.
2015	PDB riil	Pertumbuhan PDB riil melambat menjadi 4,79% di tengah pelemahan ekonomi global dan kebijakan fiskal yang kontraktif.
2016	Inflasi	Inflasi turun menjadi 3,13% setelah pemerintah kembali menerapkan kebijakan fiskal ekspansif.
2017	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,31% seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang akomodatif.
2018	Defisit Anggaran Negara	Defisit anggaran negara turun menjadi -2,08% PDB setelah pemerintah meningkatkan disiplin fiskal.
2019	Suku Bunga SPBI	Suku bunga SPBI turun menjadi 5,50% akibat kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
2020	PDB riil	Pertumbuhan PDB riil berkontraksi -2,09% akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan fiskal yang fokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan.
2021	Inflasi	Inflasi turun menjadi 1,96% setelah pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pemulihan ekonomi.
2022	Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,33% seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
2023	Defisit Anggaran negara	Defisit anggaran negara turun menjadi -2,85% PDB setelah pemerintah melanjutkan konsolidasi fiskal.
2023	Suku Bunga SPBI	Suku bunga SPBI naik menjadi 4,23% akibat kebijakan fiskal yang lebih prudent untuk menjaga stabilitas ekonomi.
2024	PDB riil	Pertumbuhan PDB riil pada tahun 2024 tetap terjaga sekitar 5%, didorong oleh kebijakan Fiskal Ekspansif melalui peningkatan belanja Negara khususnya pada sektor infrastruktur, bantuan sosial, dan dukungan Pemilu Nasional.
2025	PDB riil	Pada tahun 2025 pertumbuhan PDB riil diperkirakan tetap stabil sekitar 5,1 dan 5,2 %, didukung oleh kesinambungan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong investasi, hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi.

Sumber: Bank Indonesia.

Tabel di atas menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal pemerintah Indonesia mempengaruhi indikator-indikator makroekonomi dari tahun 2010 hingga 2023. Berikut ini adalah analisis tahunan berdasarkan dampak kebijakan fiskal terhadap PDB, inflasi, tingkat

pengangguran, defisit anggaran, dan suku bunga SPBI.

Pada tahun 2010 Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, yang mencakup peningkatan belanja untuk mendorong aktivitas ekonomi. Hasilnya, PDB riil tumbuh sebesar 4,97%, menandakan adanya peningkatan produksi barang dan jasa di Indonesia. Pada tahun 2011, Inflasi turun setelah pemerintah beralih ke kebijakan fiskal yang lebih prudent (hati-hati). Pengendalian belanja dan pengaturan alokasi anggaran menjaga tekanan inflasi agar tetap rendah, dengan hasil inflasi pada 3,31%. Kemudian tahun 2013 Pemerintah melakukan penghematan anggaran, menurunkan defisit anggaran menjadi -1,73% dari PDB. Langkah ini menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mengurangi beban utang.

Untuk menekan inflasi yang meningkat, pemerintah memperketat kebijakan fiskal, yang berdampak pada kenaikan suku bunga SPBI tahun 2014 menjadi 7,50%. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran berlebihan dan menjaga stabilitas harga. Pada tahun 2015 kebijakan fiskal kontraktif diterapkan untuk mengurangi beban anggaran. Hal ini menyebabkan pertumbuhan PDB riil melambat menjadi 4,79%, mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi akibat

terbatasnya pengeluaran pemerintah. Pada tahun 2016 Pemerintah kembali menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, yang membantu menjaga inflasi tetap rendah di 3,13%. Peningkatan belanja mendorong permintaan barang dan jasa, namun terkendali untuk mencegah inflasi yang terlalu tinggi. Kemudian pada tahun 2017 Tingkat pengangguran turun menjadi 5,31% seiring perbaikan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang akomodatif, termasuk investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2018 Pemerintah meningkatkan disiplin fiskal, menekan defisit anggaran menjadi -2,08% dari PDB. Kebijakan ini mengurangi risiko ketidakstabilan fiskal, memastikan bahwa belanja negara tidak terlalu membebani anggaran. Pada tahun 2020 Pertumbuhan PDB mengalami kontraksi -2,09% akibat pandemi COVID-19, sementara kebijakan fiskal difokuskan pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, termasuk subsidi dan stimulus untuk mengurangi dampak ekonomi. Pada tahun 2021 Inflasi turun menjadi 1,96% seiring kebijakan fiskal ekspansif pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Peningkatan belanja mendorong permintaan secara bertahap namun terkendali, sehingga inflasi tetap rendah. Konsolidasi fiskal dilanjutkan dengan mengendalikan defisit anggaran

menjadi -2,85% dari PDB. Pemerintah fokus pada stabilitas anggaran untuk menjaga kepercayaan investor dan mengurangi ketergantungan pada utang. Pada tahun 2023 Suku bunga SPBI dinaikkan menjadi 4,23% sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang lebih prudent, bertujuan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Kebijakan Fiskal Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 cenderung bersifat ekspansif dan berkelanjutan, dengan berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan penurunan Tingkat pengangguran. Sinergi antara belanja negara dan kebijakan moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai indikator makroekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan PDB riil dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, namun perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang prudent untuk menjaga stabilitas harga dan defisit anggaran negara. Secara keseluruhan, menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal Indonesia beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan tantangan eksternal dari tahun ke

tahun. Kebijakan fiskal yang ekspansif cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, sementara kebijakan yang prudent dan kontraktif diterapkan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas anggaran.

Kebijakan fiskal, yang meliputi pengaturan belanja dan penerimaan negara, bertujuan untuk memengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika pemerintah meningkatkan belanja publik atau menurunkan pajak, efeknya dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak, permintaan agregat menurun, yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Pada saat krisis, kebijakan fiskal ekspansif sering digunakan untuk mendukung ekonomi, seperti yang terlihat pada pandemi COVID-19, ketika pemerintah banyak negara meningkatkan anggaran kesehatan dan memberikan stimulus untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Disisi lain penerapan Kebijakan moneter yang dikelola oleh bank sentral, yaitu mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mencapai stabilitas harga dan menjaga likuiditas. Dengan menurunkan suku bunga, bank sentral mendorong pinjaman dan investasi,

meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga menekan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi. Contoh nyata adalah saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga selama pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampak ekonomi dan mendukung pemulihan, serta menaikkannya kembali saat inflasi meningkat pada periode pemulihan ekonomi.

Dalam situasi normal, kebijakan fiskal dan moneter perlu sejalan untuk menjaga stabilitas ekonomi Seperti:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Untuk mendorong pertumbuhan, kebijakan fiskal ekspansif yang meningkatkan belanja pemerintah bisa dipadukan dengan kebijakan moneter akomodatif berupa suku bunga rendah. Keseimbangan ini dapat membantu meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
2. **Pengendalian Inflasi:** Ketika inflasi meningkat, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat (pengurangan belanja atau kenaikan pajak), didukung oleh kebijakan moneter kontraktif (kenaikan suku bunga). Langkah ini menurunkan permintaan agregat dan menjaga harga tetap stabil.

Tantangan muncul ketika kebijakan fiskal dan moneter tidak sejalan, misalnya ketika pemerintah meningkatkan belanja publik dalam situasi inflasi tinggi, sementara bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikannya. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, meningkatkan biaya utang pemerintah, dan menurunkan efektivitas kedua kebijakan tersebut. Penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk berkoordinasi dan memahami kondisi ekonomi yang tengah berlangsung agar kebijakan yang diterapkan selaras dan lebih efektif.

Bank Indonesia dan pemerintah berusaha menjaga keseimbangan melalui komunikasi dan koordinasi dalam penetapan kebijakan. Misalnya, pada 2020, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas, sementara pemerintah mengalokasikan stimulus fiskal besar untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Koordinasi ini membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal dan mempercepat pemulihan. Secara keseluruhan, keseimbangan antara kebijakan fiskal

dan moneter adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan berkelanjutan, dan penurunan

pengangguran, terutama di masa-masa krisis maupun pemulihan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Kebijakan fiskal, yang dikelola oleh pemerintah, berfokus pada pengaturan belanja dan penerimaan negara untuk memengaruhi permintaan agregat. Kebijakan ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja publik atau insentif pajak, serta mengendalikan inflasi melalui penghematan anggaran atau pengurangan belanja. Di sisi lain, kebijakan moneter, yang dikelola oleh bank sentral, mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga, mendorong investasi, dan menekan inflasi. Dalam kondisi ideal, kedua kebijakan ini sebaiknya bekerja selaras untuk memperkuat dampaknya terhadap ekonomi. Misalnya, ketika ekonomi melemah, kebijakan fiskal ekspansif sebaiknya didukung oleh kebijakan moneter yang akomodatif, seperti suku bunga rendah, untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Sebaliknya, saat inflasi tinggi, kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter kontraktif dapat mengurangi permintaan agregat dan

stabilitas harga. Keseimbangan ini sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang berkelanjutan, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristina, K., Juliprijanto, W., & Prasetyanto, P. K. (2020). Analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(2), 403–414.
- Davoodi, H. R., Montiel, P. J., & Ter-Martirosyan, A. (2021). Macroeconomic stability and inclusive growth.
- Gita, A., Putri, S., Nur Maulidya, D., & Irfan, M. (2024). Teori kebijakan moneter. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 01(04), 915–918.
- Gunawan, C. I. (2024). *Ekonomi Makro. Book of Open Source (BOS)*, 1–132.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran kebijakan fiskal terhadap perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2986–2997.
- Mutiara, A., Siregar, I. S., Chairani, M., Nur, L. M., Afriyanti, Y., & Nadilla, T. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mendukung stabilitas ekonomi makro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 212–226.
- Novalina, A. (2019). Efek simultanitas kebijakan moneter terhadap perubahan ekonomi makro negara Civi. *JEpa*, 4(2), 37–48.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/588>
- Okri Handoko, D., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian dalam perspektif syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616)
- Ramadhani, N., Sthela Oktaviany, A., & Arkaan Satria Utama, M. (2024). Peran pemerintah menstabilkan inflasi dengan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(2), 186–195.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1171>
- Raysharie, P. I., & Alviandi, D. (2024). Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan

ekonomi: Kasus studi dalam konteks ekonomi makro. *Research Accounting And Auditing Journal*, 1, 21–32.

Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10.
<https://doi.org/10.47134/jea.v1i4.231>

Siswajanthi, F., Aliyah Shiva, K., Salsabila, N., Afifany Susanta Putry, S., Maharani Iskandar Putri, S., & Studi Ilmu Hukum, P., Pakuan Bogor, U. (2024). Analisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus Indonesia. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia*, 8, 5–8.

Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi*. Rajawali Press.